

## PSI Ajukan Uji Materi Peraturan untuk Mendirikan Rumah Ibadah

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan, pihaknya mengajukan uji materi atau *judicial review* atas Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, dan Nomor 8 Tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah.

Gugatan dilayangkan bersama dua pihak lain, yakni Anggota DPRD Kota Surabaya Josiah Michael dan Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Bandar Lampung, Kamis (2/3) lalu. Grace mengungkapkan, gugatan dilayangkan karena dinilai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kurang berperan dalam menjembatani terkait izin pendirian tempat ibadah.

"Apa pun itu namanya Forum Kerukunan Umat Beragama, harusnya kalau ada yang tidak setuju, kalau ada yang menolak, tugasnya forum adalah untuk mengkomunikasikan, menjembatani hubungan antar masyarakat, antar warga supaya semuanya harmonis," kata Grace dalam konferensi pers di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (7/3).

"Nah, namun kenyataan di lapangan justru forum ini yang tidak memberikan rekomendasi, menolak, bah-

kan mengeluarkan rekomendasi untuk ditutup," ujarnya.

PSI mengajukan uji materi pada PBM Menag dan Mendagri itu bukan untuk membubarkan FKUB. Namun, guna mengurangi kewenangannya, terutama terkait pemberian rekomendasi pembangunan tempat ibadah.

"Jadi, kalau cara-cara (izin mendirikan tempat ibadah) sudah dipenuhi langsung saja urusannya dengan pemerintah daerah," kata Grace.

Grace menekankan, uji materi ini tidak terkait dengan persoalan mayoritas dan minoritas. Namun, ia merasa bahwa FKUB di berbagai wilayah telah berperan melampaui kewenangan, dan kerap menjadi tempat berlindung kepala daerah jika terjadi persoalan pendirian tempat ibadah.

"Jadi, menurut kami, bertentangan dengan hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi kita, yaitu semua warga negara berhak untuk memeluk, dan beribadah menurut agama, dan kepercayaan masing-masing," ujar Grace.

Adapun dalam gugatannya, PSI meminta Pasal 9 Ayat (2) huruf e, Pasal 14 ayat (2) huruf d, Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (2) PBM Menag dan Mendagri itu dihapuskan. ● han

## Kasus Suap Dana Hibah, KPK Cekal 4 Anggota DPRD Jatim

JAKARTA (IM) - Empat anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) dicekal bergantian ke luar negeri oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencekalan tersebut terkait dugaan suap pengurusan alokasi dana hibah yang melibatkan eks Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simanjuntak (STPS).

"Benar, masih terkait kebutuhan proses penyidikan perkara tersangka STPS dan kawan-kawan, Tim Penyidik telah mengajukan tindakan cegah keluar negeri pada Dirjen Imigrasi Kementerian RI terhadap 4 orang yang menjabat selaku Anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 s/d 2024," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (7/3).

Namun, Ali masih enggan membeberkan identitas empat legislator yang dicekal tersebut. Ia hanya berkata, pengekalan pertama berlaku untuk enam bulan ke depan atau hingga Juli 2023.

"Langkah cegah ini diperlukan antara lain agar pa-

ra pihak dimaksud tetap berada di wilayah RI dan dapat selalu kooperatif hadir untuk memberikan keterangan dengan jujur dihadapan Tim Penyidik," kata Ali.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim. Keempat tersangka tersebut yakni, Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simanjuntak (STPS).

Kemudian, Staf Ahli Sahat Simanjuntak, Rusdi (RS); Kepala Desa Jelung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas), Abdul Hamid (AH); serta Koordinator Lapangan Pokmas, Ilham Wahyudi (IW) alias Eng.

Dalam perkara ini, Sahat dan Rusdi ditetapkan sebagai pihak penerima suap. Sedangkan Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, ditetapkan tersangka pemberi suap. Mereka beres-apat jahat terkait pengurusan alokasi dana hibah Jatim. ● me



FOTO: ANT

**SAR TEMPUR DAN PEMBEBASAN SANDERA**  
Dua personel TNI Yonko 465/Kopasgat Bramusti melakukan parameter tempat saat simulasi SAR dan pembebasan sandera di Kantor Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (7/3). Simulasi yang dilaksanakan dalam rangka peringatan HUT ke-77 TNI AU tersebut untuk meningkatkan kemampuan pasukan TNI dalam menjaga NKRI.

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## PSI AJUKAN UJI MATERIIL TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (tengah), Direktur LBH DPP PSI Francine Widjojo (kanan), dan Bendahara Umum DPP PSI Suci Mayang Sari (kiri), memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa (7/3). PSI mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pendirian rumah ibadah.

# PPATK Bekukan Puluhan Rekening Rafael, Nilai Transaksinya Mencapai Rp500 Miliar

KPK membuka peluang untuk menindaklanjuti temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo.

JAKARTA (IM) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan puluhan rekening eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael

Alun Trisambodo dan keluarganya dengan nilai transaksi lebih dari Rp500 miliar.

"Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya D/K (Debit/Kredit) lebih dari

Rp500 miliar dan kemungkinan akan bertambah," ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (7/3).

Sebelumnya, Ivan mengungkapkan, pihaknya telah memblokir puluhan rekening keluarga Rafael Alun Trisambodo (RAT), eks pejabat Ditjen Pajak. Selain itu, PPATK juga memblokir re-

kening Mario Dandy Satrio (20), terduga pelaku penganiayaan anak petinggi GP Ansor David Ozora (17).

"Iya RAT, keluarga, dan semua pihak terkait. Ada beberapa puluh rekening sudah kami blokir," ujar Ivan.

PPATK memblokir rekening milik konsultan pajak. Rekening konsultan pajak tersebut diblokir terkait indikasi pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. PPATK menyebut ada rekening pengalihan lain yang telah diblokir terkait Rafael Alun.

Diduga, ada transaksi keuangan dalam jumlah besar di rekening konsultan pajak tersebut yang berkaitan dengan Rafael Alun Trisambodo.

Namun, Ivan enggan membongkar lebih detail terkait indikasi transaksi janggal berkaitan dengan Rafael Alun.

Sebagaimana diketahui, PPATK menemukan adanya indikasi pihak profesional yang mengatur ataupun mengelola dugaan pencucian uang Rafael. Pihak itu diduga berprofesi sebagai konsultan

pajak. Rekening konsultan pajak tersebut termasuk yang ikut diblokir PPATK.

"Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai *nominee* (perantara) RAT serta beberapa pihak terkait lainnya. Kita mensinyalir ada PML (*professional money launderer*) yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT," kata Ivan.

PPATK menyebut ada indikasi transaksi janggal diduga terkait pencucian uang di rekening Rafael Alun. Selain PPATK, KPK menemukan ketidakwajaran antara harta kekayaan bernilai fantastis milik Rafael Alun dengan profilnya sebagai eselon III di DJP Kemenkeu.

KPK membuka peluang untuk menindaklanjuti temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo. Jika ditemukan adanya unsur pidana korupsi, KPK bakal menindaklanjuti. KPK telah mengklarifikasi ketidakwajaran harta kekayaan Rafael Alun tersebut, pada Rabu, 1 Maret 2023. ● han

## HARI KE-28 PILOT SUSI AIR DISANDERA Pasukan Raider Kesatria Jaya Lakukan Sweeping untuk Kejar KKB

YALIMO (IM) - Satgas Batalyon Infanteri Raider 142/Kesatria Jaya (Yonif Raider 142/KJ) melalui Pos Kotis Elelim bersama dengan Polres Yalimo menggelar Patroli Gabungan dan sweeping di wilayah Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa (7/3).

Dalam pelaksanaan kegiatan patroli Gabungan dan Sweeping serta patroli pengamanan Perimeter dilaksanakan oleh Seluruh Perwira dan personel Kotis Satgas Yonif Raider 142/KJ.

Dansatgas Yonif Raider 142/KJ Letkol Inf Esnan Haryadi mengatakan, bahwa situasi dan kondisi di beberapa daerah di wilayah Papua mendapat gangguan keamanan dari gerombolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), penyelundupan Narkoba dan aktivitas ilegal lainnya.

"Kondisi ini, maka kita bekerjasama dengan pihak Polres Yalimo, melaksanakan Patroli Gabungan dan Sweeping kendaraan untuk mengantisipasi hal hal yang tidak kita inginkan bersama," ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi lolosnya Pihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Teroris yang melakukan penyanderaan terhadap Pilot Susi Air Kapten Philips Mark Mahrtens.

"Selain melakukan patroli Gabungan dan Sweeping, kita sendiri juga melaksanakan Patroli tersendiri secara berjalan di wilayah perimenter Kotis Satgas Yonif Raider 142/KJ utamanya tempat vital di wilayah Elelim, Kabupaten Yalimo," ujarnya.

"Semoga hal-hal yang tidak kita inginkan, khususnya wilayah Kabupaten Yalimo, umumnya situasi Papua menjadi lebih aman dan bisa tetap kondusif," jelas Dansatgas Yonif Raider 142/KJ.

Operasi pembebasan Pilot Susi Air itu dipimpin oleh Komandan Komando Pelaksana Operasi (Dankolops) Brigjen TNI JO Sembiring.

Komandan Korem (Danrem) 172/ Praja Wira Yakti ini masih terus mencari keberadaan Kapten

Philips bersama pasukan gabungan.

"Memang saat ini usaha kita sudah perluas pencarian di dua kabupaten yakni Kabupaten Nduga dan Lanny Jaya," kata Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz 2023, Kombes Faizal Ramadani kepada wartawan, Jakarta, Senin (6/3).

Dikatakannya, dengan memperluas pencarian sandera di dua lokasi tersebut, bisa membuat terang permasalahan ini.

Ia menegaskan tidak ada batas waktu untuk melakukan pencarian dan penyelamatan warga negara Selandia Baru tersebut.

Satgas Damai Cartenz 2023 kata Faizal juga melakukan usaha lainnya dengan pendekatan lunak yakni negosiasi kepada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat. Selain itu juga meminta bantuan melalui unsur pemerintahan.

"Kita masih berusaha tapi belum maksimal. Kami terus bertekad untuk berusaha mendapatkan, menemukan dan menyelamatkan pilot Philip Mark," tutup Faizal. ● han

## Ahli Pidana: Surat Dakwaan Teddy Minahasa Batal demi Hukum

JAKARTA (IM) - Ahli Pidana dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI), Eva Achjani Zulfa, menyebut surat dakwaan terhadap Irijen Teddy Minahasa, batal demi hukum.

Eva mengungkapkan hal tersebut ketika menanggapi pertanyaan penasihat Hukum Teddy, Hotman Paris Hutapea, dalam sidang lanjutan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Senin (6/3).

Hotman awalnya bertanya soal pasal yang didakwakan seseorang aparat kepolisian dalam kasus narkoba, merujuk kasus Teddy Minahasa.

"Pertanyaan saya, kalau seorang aparat polisi melakukan pelanggaran terhadap tata cara penyimpanan, tata cara penyisihan narkoba, apakah harusnya didakwa 114 atau 140 yang juga sama sama pidana?" tanya Hotman.

"Iya karena spesifik ini delik propria. Di sana ada ketentuan penyidik Polri maupun PPNS 88, 89, ketika berkaitan dengan administrasi atau tata cara penyimpanan, maka kita akan tunduk pada ketentuan pasal 140 sebagai *lex specialis*," ucap Eva.

Hotman pun menegaskan kembali pertanyaannya.

"Jadi seorang penyidik polisi yang melanggar tata cara penyimpanan, menyimpan di luar jangka waktu, menyisihkan kilogram di luar ketentuan, kena sanksi pidana 140?," tanya Hotman lagi.

"Betul. Dalam konteks barang bukti," jawab Eva.

Hotman beserta tim pe-

nasihat hukum pun tersenyum mendengar jawaban Ahli Pidana tersebut. Menurut Hotman, seharusnya pasal yang didakwaan terhadap Teddy bukan Pasal 112, melainkan Pasal 140.

"Wah ini surat dakwaan salah dong majelis. Kok 112? (Sambil senyum-senyum)," ujar Hotman ke Majelis.

Hotman kembali menegaskan pertanyaannya kepada ahli pidana terkait arti dari surat dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU).

"Jadi surat dakwaan seperti itu harusnya apa?," tanya Hotman lagi.

"Batal demi hukum," ujar Eva.

"sekali lagi Bu?," tanya Hotman, menegaskan.

"Batal demi hukum," jawab Eva lagi.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus ini mantan Kapolda Sumbar Irijen Teddy Minahasa didakwa dengan Pasal 114 Ayat 2 Subsider Pasal 112 Ayat 2 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus ini bermula saat Polres Bukittinggi hendak memusnahkan 40 kilogram (kg) sabu. Namun, Teddy diduga memerintahkan Dody untuk menukur 5 kg sabu dengan tawas. Penggelapan barang bukti narkoba tersebut akhirnya terbongkar dengan rangkaian pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Sebanyak 1,7 kg sabu telah didedarkan dan 3,3 kg sisanya disita petugas. ● me

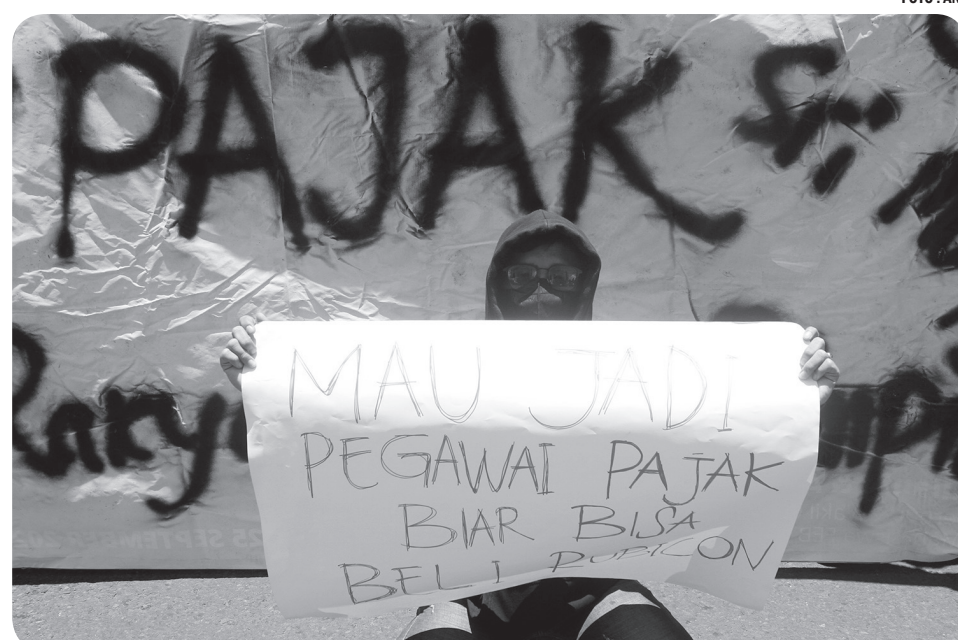


FOTO: ANT

## UNJUK RASA KRITIK GAYA HIDUP MEWAH PEJABAT DJP

Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Indonesia membawa poster saat berunjuk rasa di depan Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil III, Malang, Jawa Timur, Selasa (7/3). Selain menuntut pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pajak, mereka juga mengkritik perilaku pejabat Dirjen Pajak yang memiliki gaya hidup mewah.

### INFORMASI PENUTUPAN KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 31 Maret 2023 akan dilakukan penutupan layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

#### Kantor Cabang Pembantu Kotabumi

Jalan Jend Sudirman I/IV RT 03 No. 230  
Kotabumi, Bandar Lampung

Terkait dengan penutupan layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:  
Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin  
Kantor Cabang Bandar Lampung (0721) 486066

Hormat Kami,  
PT Bank KB Bukopin, Tbk

**KB Bukopin**